

---

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PUBLIKASI INFORMASI  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI INTERNET  
(Studi Kasus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di  
Indonesia)**

*Uswatun Hasanah  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

---

**ARTICLE INFO**

---

**Article History:**  
**Received date**  
**Revised date**  
**Accepted date**

**Keywords:**  
1-5 keywords

**ABSTRACT**

---

*This study aimed to examine the effect of government size, population, level of investment, independence ratio and per capita income for the publication of local government financial information over the internet. In this study sample of 502 district / cities in Indonesia and the data is used as much as 165. The sample was selected using purposive sampling method. The analytical methods used are the logistic regression analysis. The variables tested in this study consisted of government rules, the number of population, the level of investment, independence ratio and per capita income.*

*Based on the analysis result that independence ratio and per capita income has a positive and significant impact on the publication of local government financial information over the internet. While the size of government, population, and investment levels negatively affect the publication of local government financial information over the internet*

*Keywords: the effect of government size, population, level of investment, the ratio of self-reliance and income per capita. © 2016 JAI.*

All rights reserved

---

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Dengan adanya peraturan tersebut maka internet menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam melakukan transparansi laporan keuangan pemerintahan kepada masyarakat, karena dengan menggunakan internet maka biaya yang dikeluarkan akan lebih ekonomis. Akan tetapi masih banyaknya pemerintah daerah belum menggunakan internet sebagai sarana dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang

memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya merupakan internet. perkembangan teknologi informasi membuat pengguna internet semakin meningkat. Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi kehidupan masyarakat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Samuel A. Pangerapan, selama tahun 2014, pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 88,1 juta, yang tumbuh 16,2 juta dari sebelumnya 71,9 juta. Oleh karena itu, internet menjadi alat yang sangat efektif untuk digunakan oleh setiap penggunanya. Bagi pemerintah daerah di Indonesia, internet merupakan sarana yang dapat digunakan untuk melakukan publikasi dan transparansi informasi kepada publik terutama masyarakat.

Pengungkapan informasi melalui internet ini telah dilakukan oleh perusahaan agar dapat meningkatkan ketersediaan informasi keuangan dan informasi yang berkaitan

perusahaan bagi pengguna informasi secara cepat. Batas wilayah bukanlah menjadi halangan untuk menyampaikan informasi keuangan apabila menggunakan internet (Yurano dan Harahap, 2012). Begitu juga dengan pemerintah, jika pemerintah daerah menggunakan internet maka seluruh pengguna informasi keuangan pemda maupun non keuangan akan lebih mudah untuk mengetahui informasi tersebut, karena suatu pemda yang transparan merupakan pemda yang mampu menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Transparansi merupakan persyaratan akuntabilitas administratif kepada publik yang menjadi elemen kunci *governance*, berupa jaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan publik (Mediana, 2012). Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan penilaian atas kinerja pemerintah selama menjalankan tugasnya. Transparansi laporan keuangan pemda merupakan hal yang sangat penting karena ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemda terhadap masyarakat. Dengan transparansi ini maka masyarakat akan percaya bahwa pemda telah menjalankan dan bertanggungjawab atas amanah yang diberikan rakyat kepada pemda.

Salah satu bentuk transparansi informasi keuangan pemda berupa dengan mempublikasi laporan keuangan. Agar informasi tersebut mudah dan cepat diakses oleh penggunaannya maka pemda bisa memanfaatkan media internet yang banyak digunakan oleh sektor swasta. Menurut (Scott, 2006 dalam Trisnawati dan Ahcmad 2014) Publikasi informasi keuangan melalui internet merupakan salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*) dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan derajat transparansi.

Menurut Suwardjono dalam Andriani (2015), secara umum tujuan dari pengungkapan (*disclosure*) adalah menyajikan informasi yang di pandang perlu untuk

mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan dari pengguna. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang penting (Sari, 2014).

Pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oleh karena itu pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan penggunaanya yang membutuhkan transparansi atas pengelolaan keuangan daerah. Melalui *website* pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah kepada publik (Laswad et.al, 2005) dalam Puspita dan Martani (2012). Dengan adanya *website* tersebut maka pemerintah akan lebih transparan dalam melakukan kegiatan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat akan semakin jelas, sehingga mengurangi asimetri informasi kepada masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan pengguna *website* pemerintah daerah, pemerintah menempuh berbagai upaya antara lain dengan menerapkan sistem *elektronic government (E-government)* atau pemerintahan berbasis elektronik (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003). Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pola ini, pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* ataupun pengerjaan secara manual mulai ditinggalkan (Verawaty, 2013).

*E-government* didefinisikan sebagai pemerintahan elektronik (juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Simanggunsong, 2010). Melalui *e-government*, informasi publik bisa disampaikan oleh badan publik dengan lebih

ekonomis, efektif, dan efisien, menurut Verawaty (2013). Dengan menggunakan *e-government* maka publikasi informasi pemerintah kepada masyarakat akan lebih optimal, tepat waktu dan mudah di akses oleh pengguna laporan keuangan tersebut.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan *prinsipal* (Raharjo, 2007). Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. teori *stewardship* berfokus intrinsik tidak mudah untuk dinilai/diukur. Reward ini termasuk kesempatan untuk tumbuh, prestasi, keanggotaan dan aktualisasi diri. Bawahan dalam hubungan *stewardship* memperkuat faktor instrinsik, reward yang tidak nyata dan motivasi untuk bekerja keras dalam organisasi (Donaldson & Davis, 1989, 1991) dalam Raharjo (2007).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *stewardship*, dimana pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*. Steward menjalankan tugasnya untuk kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi, sehingga dalam melakukan publikasi laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab steward dalam menjalankan amanah dari pihak *principal*. Menurut Raharjo (2007), Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal.

Ada perbedaan yang mendasar antara teori *stewardship* dan teori agensi. Dimana menurut Raharjo (2007) Teori

Agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. *Prinsipal* mendelegasikan *responsibility desicion* making kepada agen. Baik *prinsipal* maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Sedangkan dalam teori *stewardship*, manajer cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi dibanding mementingkan tujuannya sendiri.

Jensen & Meckling (1976) dalam Raharjo (2007) menjelaskan teori organisasi dan kebijaksanaan perusahaan sangat dipengaruhi teori agensi yang menggambarkan top manajer sebagai agen dalam suatu perusahaan, dimana manajer ini mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemilik, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan kepuasannya masing masing. Dalam teori Agensi fokus ekstrinsik adalah nyata sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan, terukur dengan harga pasar. Faktor intrinsiknya merupakan bentuk dasar dari sistem imbalan yang digambarkan sebagai mekanisme kontrol teori agensi.

### 2. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003).

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya

diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program (Rahmanurrajjid, 2008). Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006 dalam Sande, 2013).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Sande, 2013). Ada beberapa instrumen penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diantaranya anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *steward*. karena masyarakat berhak atas informasi keuangan tersebut agar masyarakat dapat percaya bahwa amanat yang diberikannya dijalankan dengan baik oleh pihak *steward* yaitu pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### 3. Pemerintah Daerah di Indonesia

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah dijelaskan dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah biasanya disebut sebagai kepala daerah untuk pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, masing-masing ialah gubernur, walikota, dan bupati (Sinaga, 2011). Jadi setiap pemerintahan memiliki tugas masing-masing yang pada akhirnya akan dilaporkan hasil dari kegiatan kepada pemerintah pusat.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap provinsi memiliki beberapa kabupaten dan setiap kabupaten memiliki beberapa kecamatan, dan setiap daerah tersebut telah diatur dalam undang-undang pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung kepala daerah (pilkada).

Prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah sekarang ini, yakni semenjak UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, lebih menggambarkan pelaksanaan demokrasi. Pilkada dilaksanakan secara langsung,

terbuka kemungkinan bagi calon independen/nonparpol untuk maju melalui partai politik (parpol)/gabungan parpol, dan proses penyaringan bakal calon dilaksanakan secara terbuka dengan mewajibkan tiap parpol/gabungan parpol mengemukakan proses dan hasil penyaringan kepada masyarakat.

#### **4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Para pengguna yang dimaksud adalah masyarakat, investor, lembaga legislatif serta pemerintah.

#### **5. Publikasi Laporan Keuangan Pemda di Website**

Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Publikasi laporan keuangan pemda melalui internet adalah salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan *e-government* (Trisnawati dan Ahcmad, 2014). Dengan melakukan publikasi melalui internet maka pengguna laporan keuangan akan lebih mudah untuk

mengakses laporan keuangan tersebut. Kemudahan dalam mengakses laporan keuangan tersebut membuat para pengguna laporan keuangan tersebut dapat mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintah, hal ini akan mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi kepada masyarakat.

#### **Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Publikasian Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Website**

Penelitian Trisnawati dan Achmad (2014), ukuran pemerintah terbukti berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda di *website*. hasil ini juga didukung dengan penelitian Puspita dan Martani (2012). Karena pemerintah yang memiliki ukuran yang besar akan melakukan pengungkapan konten informasi, presentasi *website*, dan rata-rata pengungkapan konten dan presentasi yang tinggi dalam *website* Pemda.

Sedangkan hasil Afriyansyah (2013), hasil menunjukkan pelaporan keuangan pemda melalui internet tidak dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menunjukkan hasil Ukuran pemda yang semakin besar tidak mendorong Pemda untuk semakin meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangannya. Ukuran pemerintah yang besar dan dengan jumlah kekayaan yang banyak dan pemerintah juga dituntut untuk melakukan publikasi informasi keuangan dengan cepat dan transparan, sehingga internet menjadi salah satu alat yang dapat dimanfaatkan oleh pemda dalam mempublikasikan informasi keuangan. Dari uraian diatas maka hipotesisnya sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di website**

#### **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Website**

Jumlah penduduk yang banyak akan lebih mendorong pemerintah untuk melakukan publikasi informasi keuangan pemda dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Penelitian Piotrowski dan Bertelli (2010) dalam Andriani (2015), menemukan bahwa jumlah penduduk yang semakin besar akan meningkatkan permintaan terhadap transparansi publik. Hasil dari penelitian Andriani (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam *website* Pemda. Hasil ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dengan *size* yang besar memiliki birokrasi yang lebih kompleks, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah lebih sulit jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang kecil.

Namun dalam penelitian Hilmi dan Martani (2009) bahwa jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan. Daerah dengan penduduk besar didominasi dengan daerah perkotaan. Kompleksitas ini tidak menghambat tingkat pengungkapan tetapi bahkan meningkatkan tingkat pengungkapan.

Tujuan pembuatan laporan keuangan pemerintah adalah untuk penggunaannya, salah satu pengguna laporan keuangan adalah masyarakat atau penduduk suatu daerah. Jika disuatu daerah memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak maka akan banyak juga yang membutuhkan laporan keuangan pemerintah daerah di suatu tempat. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah dituntut untuk lebih transparan dalam pengungkapan laporan keuangan dan cepat. Salah satu alat untuk melakukan publikasian informasi keuangan yang cepat dan mudah untuk mengetahui informasi keuangan pemerintah adalah internet. Berdasarkan teori diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap publikasi informasi keuangan pemda di *website*.**

### **Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap Publikasian Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di *Website*.**

Banyak penduduk memiliki sikap positif terhadap proyek-proyek publik yang membutuhkan investasi, karena mereka memahami bahwa proyek ini akan meningkatkan kondisi hidup mereka (Afriyansyah, 2012). Oleh karena itu sikap masyarakat yang selalu berpikir positif terhadap proyek pemerintah ini akan meningkatkan tingkat investasi pada daerah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada daerah tersebut selalu mendukung setiap proyek pemerintah karena mereka mengetahui bahwa proyek tersebut akan meningkatkan perekonomian daerah mereka dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan perekonomian hidup mereka.

Penelitian Afriyansyah (2012) tingkat investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Dengan pemerintah melakukan transparansi laporan keuangan dan memberikan informasi di *website* pemda tentang proyek-proyek pemerintah akan mendorong masyarakat untuk melakukan investasi terhadap proyek tersebut. Berdasarkan teori diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: tingkat investasi berpengaruh positif terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di *website*.**

### **Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di *Website***

Tingkat kemandirian disuatu daerah ditunjukkan dengan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran oprasional guna mewujudkan pembangunan dan pelayanan daerah. Jika suatu daerah telah mampu membiayai kegiatan daerah ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah baik. Pemda yang memiliki performa yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela (seperti dalam bentuk *voluntary internet-based disclosure*) dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi untuk masyarakat (Craven &

Marston, 1999) dalam Puspita dan Martani (2012).

Peneliti Rora dan Martani (2012) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan di *website* pemerintah daerah. Suatu pemda yang memiliki kinerja tinggi tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan konten informasi yang tinggi, memiliki presentasi *website* yang juga tinggi, dan tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan rata-rata konten dan presentasi yang tinggi pada *website* Pemda. Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menunjukkan bahwa Variabel rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) menemukan hasil bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi pada situs resmi pemerintah daerah. Tingginya tingkat kemandirian daerah akan mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi informasi keuangan pemda. Berdasarkan teori diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di *website***

### **Pengaruh Pendapat Perkapita Terhadap Publikasian Informasi Keuangan Pemerintah daerah di *Website***

Pendapatan perkapita ini digambarkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena dengan masyarakat yang produktif maka pendapatan perkapita pada masyarakat akan lebih tinggi. Masyarakat dengan pendapatan perkapita yang tinggi akan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, tak terkecuali internet. Perkembangan teknologi informasi pun semakin pesat, sehingga mendorong pemerintah ikut berperan aktif dalam teknologi tersebut salah satu contohnya yaitu dengan pelaporan keuangan daerahnya melalui internet (Hudoyo dan Mahmud 2014).

Berdasarkan penelitian Hudoyo dan Mahmud (2014) menunjukkan hasil pendapatan per kapita berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan menambah jumlah pengungkapan laporan keuangannya di internet.

Namun berdasarkan penelitian Medina (2012) bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan di situs. Karena tingginya pendapatan perkapita tidak secara langsung memberikan dampak bahwa penduduk membutuhkan informasi keuangan yang dikeluarkan pemerintah daerah pada situsnya (Medina, 2012).

Jika kesejahteraan disuatu daerah baik cenderung pola pikir masyarakat lebih maju, situasi ini akan mendorong pemerintah dalam melakukan publikasian informasi keuangan pemda melalui internet. Berdasarkan teori diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>: pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di *website*.**

### **METODE PENELITIAN**

Objek dari penelitian adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasi oleh pemda melalui internet untuk tahun 2013, sedangkan subjek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Populasi penelitian ini adalah seluruh pemda kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia adalah 502 pemda kabupaten/kota. Pengambilan sampel menggunakan *puposive sampling*. Adapun data yang akan digunakan memiliki kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria sampel sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan yang dipublikasi telah di audit oleh BPK untuk tahun 2013

- b. LKPD 2013 di ungkapkan di website pemerintah
- c. Pemerintah memiliki website resmi dan dapat diakses

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang di dapat dari media perantara. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah laporan keuangan tahun 2013 yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) serta jumlah penduduk diperoleh dari badan Pusat Statistik (BPS).

Data variabel dependen yaitu publikasi informasi keuangan pemda di *website*, diperoleh dengan mengamati langsung pada situs resmi pemerintah daerah. Alamat situs resmi pemerintah daerah didapat dari [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id).

Dari penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdapat di dalam *website* resmi pemda dan laporan keuangan tersebut telah diaudit. Dilakukan melalui survey terhadap masing-masing situs resmi untuk mengumpulkan data yang mendukung variabel dependent.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **Publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah**

Publikasi informasi keuangan Pemerintah daerah di *website*

Publikasi informasi adalah bentuk transparansi pemerintah daerah terhadap laporan keuangan kepada masyarakat. Variabel ini di merupakan variabel *dummy* yang diukur menggunakan publikasi informasi keuangan pemda melalui internet yang dinilai dari ada tidaknya APBD, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), LKPD sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan oprasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan LAKIP pada situs resmi pemerintahan daerah, Trisnawati dan Achmad (2014).

Pegukuran variabel Publikasi informasi keuangan Pemda melalui Internet dengan *dummy* seperti yang dilakukan oleh peneliti Trisnawati dan Achmad (2014). Jika didalam publikasi informasi keuangan pemerintahan

menyediakan APBD, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), LKPD sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan LAKIP tersedian dalam situs resmi pemda, maka akan diberi nilai 1 (satu), akan tetapi jika salah satu dari komponen diatas tidak tersedia maka nilainya 0 (nol).

#### **Ukuran Pemerintah**

Trisnawati dan Achmad (2014) menggunakan ukuran total aset pemerintah daerah di indonesia sebagai faktor yang mempengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*DWEB*). Puspita dan Martani (2012) juga menggunakan total aset sebagai faktor yang mepengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam website pemerintah daerah. Dengan demikian ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini di ukur menggunakan proksi besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### **$Ln$ (Total Aset)**

#### **Jumlah Penduduk**

Variabel jumlah penduduk suatu daerah dilihat dari banyak penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintahan. Daerah dengan penduduk besar didominasi dengan daerah perkotaan. Kompleksitas ini tidak menghambat tingkat pengungkapan tetapi bahkan meningkatkan tingkat pengungkapan (Hilmi dan Martani, 2009). Dalam hal ini, variabel jumlah penduduk akan dilihat dari jumlah penduduk yang ada pada daerah tersebut.

#### **$Ln$ (Jumlah Penduduk)**

#### **Tingkat Investasi**

Afriyansyah (2013), Investasi terhadap proyek publik dalam jumlah besar akan menjadi daya tarik tersendiri di tengah masyarakat. Salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui tentang investasi proyek publik ini adalah di *website*. Dalam hal ini, variabel tingkat investasi diukur dari total nilai investasi pada laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **$Ln$ (Total Nilai Ivestasi)**

## Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian tinggi bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio kemandirian daerah dihitung dengan besarnya Pendapatan Asli daerah dibandingkan dengan total realisasi anggaran pendapatan yang diterima (Puspita dan Martani, 2012). Medina (2012) juga menggunakan rasio PAD sebagai indikator independensi pemerintah daerah

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan}}$$

## Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah (Hudoyo dan Mahmud 2014). Tingkat pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator perekonomian suatu pemerintahan baik itu dalam skala nasional ataupun daerah. Pendapatan per kapita didapat dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut

$$= \frac{\text{Pendapatan per kapita PDRB tahun } t}{\text{Penduduk daerah dalam tahun } t}$$

## Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ialah regresi logistik (*Logistic Regression*). Metode ini dipilih karena variabel dependen bersifat kategorikal atau nominal, dan variabel independen berupa kombinasi data rasio dan nominal. Model penelitian ini bertujuan untuk menguji pemerintah daerah yang melakukan publikasian informasi keuangan pemda melalui internet. berdasarkan rumusan masah dan kerangka pemikiran yangtelah diuraikan sebelumnya, Model regresi logistik yang digunakan adalah :

$$DWEB = \alpha + \beta_1 \text{ukuran pemda} + \beta_2 \text{jumlah penduduk} + \beta_3 \text{tingkat investasi} + \beta_4 \text{rasio kemandirian} + \beta_5 \text{pendapatan perkapita} + e$$

DWEB = Dummy Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = Slope atau Koefisien Regresi

ukuran pemda = total aset

jumlah penduduk = total jumlah penduduk

tingkat investasi = total investasi

rasio kemandirian = total PAD

pendapatan perkapita = tingkat kesejahteraan masyarakat

$e$  = error

Uji koefisien regresi untuk menguji sejauh mana pengaruh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model terhadap variabel terikat. Cara untuk menentukan koefisien regresi ini adalah dengan menggunakan wald statistik atau nilai probabilitas (sig). Jika menggunakan nilai wald statistic, maka nilai wald statistic dibandingkan dengan Chai-square tabel. Namun jika menggunakan nilai probabilitas, maka nilai probabilitas dibandingkan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ). oleh karena itu hipotesis diterima jika nilai sig <  $\alpha$  (0.05) dan jika koefisien regresi searah dengan hipotesis.

## Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

## Multikolienaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antar variabel independennya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memiliki *website* resmi pada periode penggunaan 2015 serta laporan keuangan yang telah diaudit. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode *purposive sampling*, jumlah sampel yang memenuhi kriteria diperoleh 313 pemerintah daerah dari 502 pemerintah daerah. Berdasarkan klasifikasi tabel 4.1, jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun 2013 sebanyak 502 kabupaten/kota. Akan tetapi setelah dipilih yang memenuhi kriteria sampel yang dapat diolah sebanyak 313 kabupaten/kota. Akan tetapi setelah melakukan pengujian analisis data terdeteksi 148 sampel yang bias sehingga sampel tersebut harus dibuang. Oleh karena itu, data yang diolah dengan menggunakan model regresi dalam penelitian ini menjadi berjumlah 165 data.

## B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 memberikan gambaran statistik deskriptif dari setiap variabel khususnya minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah pengamatan. Jumlah pengamatan dalam penelitian yaitu 165 sampel. Rasio Kemandirian memiliki nilai minimum terkecil dari variabel lainnya yaitu sebesar 0,01, nilai maksimum 0,13, rata-rata 0,06 dengan standar deviation 0,027. Variabel Ukuran Pemerintah memiliki nilai minimum 227,64. Nilai maksimum 28,87 dimana ukuran pemerintah yang memiliki nilai maksimum tertinggi dari variabel lainnya, rata-rata 28,28, standar deviation 0,30. Variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai minimum 11,20, nilai maksimum 14,30, nilai rata-rata 12,83 dengan standar deviation 0,72. Variabel Tingkat Investasi memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 28,20, nilai minimum 27,59, nilai maksimum 28,85, dan standar deviation 0,29. Variabel Pendapatan Perkapita memiliki nilai minimum 8,73, nilai maksimum 10,34, nilai rata-rata 9,58 dan standar deviation 0,37. Variabel Publikasi

informasi keuangan pemerintah daerah di *website* (DWEB) memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 1, nilai rata-rata 0,49, dan standar deviation 0,501.

## C. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat korelasi antar variabel independen nya. Untuk menguji hal tersebut maka dilakukan uji multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah ditemukan korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen, karena tidak ada nilai yang melebihi 0,90 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinieritas antara variabel independen dalam penelitian ini.

## D. Uji Kualitas Data

### 1. Uji Nilai -2 Log Likelihood

Berdasarkan dari hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow Test* ditemukan hasil bahwa *Chi-square* sebesar 7,855 dengan nilai sig 0,448. Dari hasil tersebut didapat bahwa nilai sig sebesar  $0,448 > \alpha$  0,05, maka dapat disimpulkan model regresi layak digunakan untuk melanjutkan pengujian penelitian ini.

### 2. Menilai Overall Model Fit

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai -2LL awal sebesar 288,005 sedangkan nilai -2LL akhir memiliki nilai sebesar 216,309. penurunan ini menunjukkan bahwa model regresi baik, artinya model fit dengan data.

### 3. Menguji Koefisien Determinan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,091 atau 9,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel publikasi informasi keuangan melalui internet dapat dijelaskan sebesar 9,1% Oleh variabel-variabel independen yaitu rasio kemandirian, ukuran pemerintah, jumlah penduduk, tingkat investasi, dan pendapatan perkapita sedangkan sisanya sebesar 90,9% dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4. Tabel Klasifikasi

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, kekuatan model untuk memprediksi kemungkinan adanya informasi keuangan pemerintah daerah di *website* adalah 51,9%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan regresi ini terdapat 40 pemerintah daerah yang diprediksi menyajikan informasi keuangan di *website* pemerintah dari total 77 pemerintah daerah yang menyajikan informasi keuangan di *website*. Sedangkan kekuatan model untuk memprediksi tidak adanya informasi keuangan pemerintah daerah di *website* adalah sebesar 69,3% yang berarti bahwa dengan model regresi ini terdapat 61 pemerintah daerah yang diprediksi tidak melaporkan informasi keuangan di *website* dari total 88 pemerintah daerah yang tidak menyajikan laporan keuangan di *website*.

### E. Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

#### 1. Persamaan Regresi Logistik

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$DWEB = 12,075 + 16,229 (RK) + 0,394 (UP) - 0,227 (JP) - 0,232 (TI) + 0,963 (PP) + e$$

#### Hasil pengujian hipotesis 1 (H1)

Dari hasil pengujian Terlihat bahwa variabel rasio kemandirian terhadap publikasi informasi keuangan di *website* oleh pemerintah daerah yang diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi  $(0,015) < \alpha (0,05)$  dengan nilai koefisien positif sebesar 16,229. Dengan demikian rasio kemandirian suatu daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi informasi keuangan daerah di *website*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H<sub>1</sub> diterima**.

#### Hasil pengujian hipotesis 2 (H2)

Variabel ukuran pemerintah terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di *website* menggunakan perhitungan *Natural Logaritma* memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.394 dengan nilai signifikansi  $(0,877) > \alpha (0,05)$ . Hal ini menunjukkan variabel ukuran pemerintah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di *website*, maka dapat disimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> ditolak**.

#### Hasil pengujian hipotesis 3 (H3)

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di *website* yang menggunakan perhitungan *Natural Logaritma* memiliki nilai koefisien negatif  $(-0,227)$  dengan nilai signifikansi  $(0,793) > \alpha (0,05)$  Hal tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi informasi keuangan di *website* oleh pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H<sub>3</sub> ditolak**.

#### Hasil pengujian hipotesis 4 (H4)

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Investasi terhadap publikasi informasi keuangan di *website* oleh pemerintah daerah yang menggunakan perhitungan *Natural Logaritma* memiliki nilai koefisien negatif  $(-0,232)$  dengan nilai signifikansi  $(0,436) > \alpha (0,05)$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi informasi keuangan di *website* oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H<sub>4</sub> ditolak**

#### Hasil Pengujian hipotesis 5 (H5)

Dari hasil pengujian Terlihat bahwa variabel Pendapatan Perkapita

terhadap publikasi informasi keuangan di *website* oleh pemerintah daerah yang diprosikan dengan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) memiliki nilai signifikansi  $(0,042) > \alpha (0,05)$  dengan nilai koefisien positif (12,075). Dengan demikian pendapatan perkapita suatu daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi informasi keuangan daerah di *website*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H<sub>5</sub> diterima**.

## F. Pembahasan

### 1. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Website

Berdasarkan hasil pengujian variabel rasio kemandirian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah di *website* dengan arah koefisien yang menunjukkan nilai positif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Medina (2012) yang menyatakan bahwa tingkat rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs pemerintah daerah. Hasil penelitian Sari (2014) juga menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan arah koefisien yang menunjukkan nilai positif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat rasio kemandirian maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya (Median, 2012). Pada dasarnya rasio kemandirian suatu daerah yang baik itu menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu membiayai setiap pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerah

tersebut tanpa meminta bantuan dari pemerintah pusat. Sesuai dengan teori *stewardship* pemerintah daerah melakukan pengungkapan untuk membuktikan bahwa pemerintah melakukan tanggungjawabnya dengan baik dan agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah disuatu daerah tersebut.

Berbeda dengan hasil dari penelitian Puspita dan Martani (2010) yang menunjukkan bahwa rasio PAD tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

### 2. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Website

Hasil pengujian variabel ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap publikasi informasi keuangan di *website*. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dipemerintah yang belum terlalu familiar terhadap internet sehingga mereka belum bisa melakukan publikasi informasi di *website*. Alasan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah di luar Jawa adalah kualitas sumber daya manusia, sehingga pemerintah daerah dengan jumlah aset yang besar tetapi mempunyai sumber daya manusia yang

berkualitas rendah tidak menjamin bahwa pemerintah daerah tersebut memanfaatkan teknologi informasi (internet) dalam pelaporan akuntabilitas dan transparansi informasi keuangan (Rahman dkk, 2013).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Lesmana (2010) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di internet. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sinaga (2011) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintahan daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Namun hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014), ukuran pemerintah terbukti berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.

### **3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap publikasi Informasi Keuangan Pemerinta Daerah di Website**

Berdasarkan hasil pengujian variabel jumlah penduduk daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di *website*. hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk ditolak. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2015) yang diketahui bahwa variabel Jumlah Penduduk (*Size of the Public*) tidak terbukti signifikan mempengaruhi tingkat

Pengungkapan informasi non keuangan dalam website Pemda. Jumlah penduduk yang banyak tidak mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi keuangan di *website*, karena jumlah penduduk yang banyak namun tidak memiliki daya pikir yang baik dan kritis terhadap kinerja pemerintah maka permintaan atas laporan keuangan akan rendah. Biasanya ini terjadi pada pemerintah kabupaten yang masyarakatnya banyak dan kompleks mulai dari masyarakat kabupaten hingga masyarakat desa yang mayoritas tingkat kelahirannya lebih tinggi dibandingkan masyarakat kota. Maka dari itu banyak ataupun sedikit jumlah penduduk disuatu daerah tidak dapat membuktikan untuk mendorong suatu pemerintah melakukan pempublikasian informasi keuangan di *website*.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2009) bahwa Jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintahan. Daerah dengan penduduk besar didominasi dengan daerah perkotaan. Kompleksitas ini tidak menghambat tingkat pengungkapan tetapi bahkan meningkatkan tingkat pengungkapan.

### **4. Pengaruh Tingkat Investasi terhadap Publikasi Informasi Keuangan Pemerinta Daerah di Website**

Berdasarkan hasil pengujian variabel tingkat

investasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap publikasi informasi keuangan di *website*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afryansyah (2013) yang menyatakan bahwa tingkat investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Dengan melihat anggaran setiap kota pada tahun pemilihan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa politisi memiliki kepentingan dalam memulai investasi proyeknya yang ambisius dengan harapan dapat menangkap pemilih sebanyak-banyaknya. Namun pemerintah masih kurang dalam melakukan transparansi laporan keuangan tentang proyek-proyek pemerintah akan mendorong masyarakat untuk melakukan investasi terhadap proyek tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan investasi terhadap proyek-proyek pemerintah. Pemerintah hanya melakukan transparan informasi kepada pihak investot yang bersangkutan secara langsung agar pemerintah dapat secara langsung mempertanggung jelaskan dan mempertanggung jawabkan hasil proyek yang dijalankan.

##### **5. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap publikasi Informasi Keuangan Pemerinta Daerah di *Website***

Berdasarkan hasil pengujian variabel pendapatan perkapita menunjukkan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah di *website*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hudoyo dan Mahmud (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan

perkapita berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan lebih dapat tekanan dalam melakukan pelaporan keuangan karena semakin tinggi tingkat kebutuhan dan pendidikan masyarakat yang menuntut transparan dari pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita didaerahnya maka pemerintah tersebut mampu mensejahterakan masyarakatnya sehingga pemerintah akan lebih terdorong untuk melakukan publikasi informasi keuangan di *website*.

Hasil ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi akan menambah jumlah pengungkapan laporan keuangannya di internet (Hudoyo dan Mahmud, 2014). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs pemerintah daerah.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, tingkat investasi, rasio kemandirian dan pendapatan perkapita terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah melalui internet. Penelitian ini menggunakan sampel berupa pemerintah daerah kabupaten dan kota yang melakukan publikasi laporan keuangan di *website* pemerintah untuk tahun 2013 yang telah memenuhi kriteria dalam melakukan penelitian ini, sehingga

jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 165 kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi logistik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian terbukti memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi keuangan di *website*. Pada dasarnya rasio kemandirian suatu daerah yang baik itu menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu membiayai setiap pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerah tersebut tanpa meminta bantuan dari pemerintah pusat.
2. Ukuran pemerintah tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi keuangan di *website*. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dipemerintah yang belum terlalu familiar terhadap internet sehingga mereka belum bisa melakukan publikasi informasi di *website*.
3. Jumlah penduduk tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi keuangan di *website*. Jumlah penduduk yang banyak tidak mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi keuangan di *website*, karena jumlah penduduk yang banyak namun tidak memiliki daya pikir yang baik dan kritis terhadap kinerja pemerintah maka permintaan atas laporan keuangan akan rendah.
4. Tingkat investasi tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi keuangan di *website*. Namun pemerintah masih kurang dalam melakukan transparansi laporan keuangan dan memberikan informasi di *website* pemda tentang proyek-proyek pemerintah akan mendorong masyarakat untuk melakukan investasi terhadap proyek tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan investasi terhadap proyek-proyek pemerintah.

5. Pendapatan perkapita terbukti memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi keuangan di *website*. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan lebih dapat tekanan dalam melakukan pelaporan keuangan karena semakin tinggi tingkat kebutuhan dan pendidikan masyarakat yang menuntut transparan dari pemerintah daerahnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

### 1. Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah yang disajikan di dalam situs resmi pemerintah. Informasi keuangan pemerintah diharapkan selalu *update* sehingga dapat memperlihatkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan membuktikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan.

### 2. Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang lebih memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi keuangan di internet, seperti tipe pemerintah, tingkat pendidikan. Dapat juga mempertimbangkan untuk mengembangkan indeks pengungkapan informasi keuangan untuk pelaporan keuangan di internet dengan memberi *scoring* sesuai banyaknya informasi keuangan untuk menilai pelaporan keuangan di internet.

## C. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian.

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan keuangan di internet diukur menggunakan *dummy* tanpa memperhatikan seberapa banyak informasi keuangan yang disajikan, sehingga belum menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pelaporan keuangan di internet.
2. Kemampuan variabel yang diteliti dalam menjelaskan publikasi laporan keuangan pemda melalui internet dalam penelitian ini masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.
3. Jangka waktu penelitian yang hanya mengambil periode observasi selama 1 tahun. Dikarenakan data terlalu banyak yang bias sehingga sampel yang dapat digunakan 165, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Rahmad Dian. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi*. FEB UNDIP. Semarang.
- Andriani, Yelvina. 2015. Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negri Padang.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2012). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun Anggaran 2013*.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2012). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun Anggaran 2013*.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hilmi, Amirudin Zul dan Dwi Martani. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposiun Nasional akuntansi*.
- Hudoyo, Yacoeb Triandy dan Amir Mahmud. 2014. Fakto-Faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Lesmana, S. I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. *Skripsi Sarjana*. Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Piotrowsky, S.J., & Bertelli, A. 2010. Measuring Municipal Transparency. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
- Puspita, Rora. Dwi, Martani. (2012). Analisis pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat

- Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi 15*, Banjarmasin.
- Rahamnurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah. *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* Vol. 2 No. 1 Juni 2007 : 37 46.
- Rahman,A.,Sutaryo.,2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, Sesi I/11, September.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Sari, Dwi Maya. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi*. FE UMY program akuntansi.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyan Syafitri 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 154-170.
- Simangunsong,j. 2010. Pengembangan E-Government Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Magester Teknologi Informasi UI*. Jakarta.
- Sinaga, Y. B. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugioyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Badung.
- Trisnawati, Mya Dewi dan Komarudin Achmad. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintahdaerah Melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, Lombok.
- Verawaty. 2013. Analisis Komparasi Indeks *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah Di Indonesia.
- Yurano, Ispen Asep dan Siti Nurwahyu Harahap. 2012. Persepsi Pengguna Laporan Keuangan Di Indonesia Terhadap Internet Financial Reporting (Ifr). *Artikel Ilmiah UI*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Nomor 105 tahun 2000 Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* Nomor 71 Tahun 2010.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia*. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.



**LAMPIRAN**

**Tabel 4.2**

**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
DWEB	165	0	1	,47	,500	,250
RasioKemandirian	165	,01	,13	,0638	,027	,001
LN_UkuranPemda	165	27,64	28,87	28,28	,30	,091
LN_JumlahPenduduk	165	11,20	14,30	12,83	,72	,530
LN_TingkatInvestasi	165	27,59	28,85	28,20	,29	,087
LN_PendapatanPerkapita	165	8,73	10,34	9,58	,37	,137
Valid N (listwise)	165					

**Tabel 4.3**

**Uji Multikolinieritas**

**Correlation Matrix**

		Constant	RK	UK	JP	TI	PP
Step 1	Constant	1,000	,014	-,104	,299	-,144	-,081
	RK	,014	1,000	-,155	-,335	,161	,073
	UK	-,104	-,155	1,000	-,198	-,965	-,226
	JP	,299	-,335	-,198	1,000	,064	,235
	TI	-,144	,161	-,965	,064	1,000	,172
	PP	-,081	,073	-,226	,235	,172	1,000

**Tabel 4.4**

**Pengujian Kelayakan Model**

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7,855	8	,448

**Tabel 4.5**

**Pengujian Keseluruhan Model**

-2LL awal (Block Number = 0)	228,005
-2LL akhir (Block Number =1)	216,309

**Tabel 4.6**

**Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	216,309 <sup>a</sup>	,068	,091

Sumber : Data diolah melalui SPSS 22, 2015

**Tabel 4.7**  
**Tabel Klasifikasi**  
**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed		Predicted		
		DWEB		Percentage Correct
		Tidak Mengungkapkan di Website	Mengungkapkan di Website	
DWEB Tidak Mengungkapkan di Website	61	27	69,3	
Mengungkapkan di Website	37	40	51,9	
Overall Percentage			61,2	

a. The cut value is ,500

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Hipotesis**

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup> RasioKemandirian	16,229	6,649	5,958	1	,015	11175014,784
LN_UkuranPemda	,394	2,539	,024	1	,877	1,482
LN_JumlahPenduduk	-,227	,292	,608	1	,436	,797
LN_TingkatInvestasi	-,232	2,506	,009	1	,926	,793
LN_PendapatanPerkapita	,963	,474	4,134	1	,042	2,619
Constant	-					
	12,075	16,863	,513	1	,474	,000

a. Variable(s) entered on step 1: RasioKemandirian, LN\_UkuranPemda, LN\_JumlahPemda, LN\_TingkatInvestasi, LN\_PendapatanPerkapita.

Sumber: Data diolah melalui SPSS 22, 2015